

MAARIF Vol. 11, No. 2 – Desember 2016

ISSN : 1907-8161

MAARIF

ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL

**SETELAH “BELA ISLAM”:
GERAKAN SOSIAL ISLAM,
DEMOKRATISASI, DAN
KEADILAN SOSIAL**



PEREMPUAN DAN MEDIA DALAM AKSI “BELA ISLAM”

Alimatul Qibtiyah

Abstrak

Banyak kalangan menyebut bahwa Aksi “Bela Islam” pada akhir 2016 adalah suatu kejadian yang fenomenal dan menarik perhatian, baik media maupun peneliti gerakan sosial keagamaan. Peran perempuan di Aksi “Bela Islam” (ABI) pada posisi logistik dan kebersihan, bukan sebagai top leader yang punya panggung. Hal ini ditegaskan dengan istilah ABI yang mengacu pada “ayah” dalam bahasa Arab. Porsi perempuan yang terlihat di denah lokasi di Monas lebih dari 1/3 (sepertiga) menunjukkan ada perhatian pada perempuan.

Berdasarkan data baik berupa gambar, visual dan juga teks yang ada pada empat media cetak: Media Umat, Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah dan juga SKH Kedaulatan Rakyat, menunjukkan bahwa Media Umat sangat gigih dan mendukung ABI dengan menggunakan bahasa yang mempunyai tingkat intensitas tinggi, seperti “Ahok Harus Tersangka” atau “Umat Wajib Marah”. Sementara Majalah Gontor lebih menekankan pada isu kepemimpinan bahwa pemimpin Muslim lebih baik. Suara Muhammadiyah lebih menekankan pada kekhawatiran terpecah belahnya umat Islam sehingga perlu ada seruan bersatu. ABI menurut Suara Muhammadiyah lebih disebabkan karena tersumbatnya aspirasi umat Islam dan juga ketidakadilan pada umat Islam. Terakhir SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan sikap netral pada ABI. Bahkan tidak ada rekomendasi yang jelas terkait dengan isu Aksi “Bela Islam”. **Kata Kunci:** ABI, Perempuan, Media

Pendahuluan

Aksi “Bela Islam” (ABI) akhir 2016 memang mengejutkan berbagai kalangan baik secara nasional maupun internasional. Aksi ini tidak hanya menarik bagi para simpatisan tetapi juga para peneliti dan pengamat gerakan sosial keagamaan. Beberapa berargumentasi

bahwa aksi ini akan menjadi momentum pecah belahnya ummat Islam sebagaimana di tempat lain. Namun kelompok lain berargumen bahwa ada kekuatan penggerak yaitu akidah yang justru dapat menyatukan ummat Islam dari berbagai kalangan dan ormas. Sebenarnya tidak hanya masalah isu akidah, tetapi isu politik, ekonomi dan juga ketidakadilan digunakan untuk menggerakkan Aksi Bela Islam tersebut.

Di saat bicara mengenai gerakan sosial keagamaan, maka sebenarnya di dalamnya juga termasuk gerakan feminis Islam yang sarat dengan isu keadilan perempuan dan juga bagaimana media melakukan *framing* isu tersebut. Tulisan ini akan melihat peran perempuan dan bagaimana perempuan diposisikan pada Aksi “Bela Islam” (ABI) tersebut dan juga bagaimana media melakukan *framing* isu tersebut. Media yang dipilih adalah pada tulisan ini adalah empat media cetak yaitu Tabloid Media Ummat (HTI), Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah, dan SKH Kedaulatan Rakyat. Pemilihan media ini didasarkan pada kecenderungan variasi ideologi keagamaan dari yang konservatif sampai yang progresif.

Pada umumnya perempuan diposisikan bukan sebagai *top leader* tetapi lebih sebagai pelengkap dan penyemarak serta diberi tugas secara dominan pada urusan logistik dan kebersihan. Tanpa harus merendahkan urusan logistik dan kebersihan, namun secara politik ABI cenderung patriarkhis dan mengilustrasikan seolah komunikasi dengan Tuhan itu dominasi laki-laki. Bahkan istilah ABI (Aksi “Bela Islam”) itu juga mengarah pada bahasa Arab yang berarti ayah (laki-laki).

Peran Perempuan Islam di Tengah Maskulinitas “Bela Islam”

Di saat bicara tentang peran perempuan di kegiatan yang berskala nasional seperti Aksi “Bela Islam” (ABI), maka tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan feminis Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah dinamika relasinya dengan internal aktivis perempuan sendiri, kelompok Islamis, kelompok pembaharuan atau kelompok progresif, politik gender pemerintah dan juga relasi kemitraan internasional.¹ Pada kasus ABI maka sebenarnya yang paling berpengaruh adalah faktor politik keagamaan dari kalangan Islamis. Jika melihat prestasi gerakan perempuan dalam sejarah maka sebenarnya tidak terlalu khawatir akan pengaruh ABI terhadap kehidupan perempuan secara langsung. Namun jika hal serupa terulang-ulang dan semakin menguatnya kalangan tektualis maka otomatis ini akan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa kecenderungan berfikir orang yang tektualis ini berdampak pada kehidupan dan posisi perempuan yang kurang baik.

¹ Alimatul Qibtiyah, “Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement.” *Journal of Indonesian Islam*. 03.01 (2009): 168-196.

Yang dimaksud kalangan Islamis adalah kalangan tekstual yang cenderung memahami teks-teks keagamaan secara harfiah. Pendekatan ini menghasilkan ajaran-ajaran yang bersifat normatif dan tekstual termasuk ajaran-ajaran yang diambil dari teks-teks utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Pendekatan ini cenderung mengabaikan karya para ulama dari periode klasik.² Bila ditafsirkan dengan cara ini, makna dari teks atau ayat apa pun tidak menjadi problematik; semuanya diterima seolah-olah tafsir itu tidak dibentuk oleh kelompok orang tertentu dan dalam kurun sejarah tertentu. Maknanya sepenuhnya dianggap sebagai pemaknaan yang dinisbatkan langsung pada makna ketika teks tersebut pertama kali diwahyukan.

Kelompok tekstualis mengklaim bahwa ajaran-ajaran agama tidak pernah berubah sepanjang sejarah dan pemahaman atas ajaran-ajaran tersebut sama sekali tidak boleh diubah sedikitpun meskipun masyarakat telah berubah. Dari perspektif mereka, makna-makna yang dianggap orisinal tersebut tetap sah dan berlaku untuk semua zaman dan di segala tempat. Pendekatan terhadap teks semacam ini menghasilkan ajaran-ajaran yang konservatif dan menekankan dogma yang memerintahkan kepatuhan mutlak pada apa yang dianggap sebagai kewajiban-kewajiban agama, tanpa penambahan. Bahkan, tidak boleh ada penggunaan bahasa daerah dalam ritual apa pun. Secara umum, kelompok literalis menentang filsafat pembaharuan, termasuk pandangannya tentang gender dan feminisme. Mereka mengklaim bahwa gender dan feminisme merupakan ideologi-ideologi Barat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Bahkan, mereka berargumen bahwa orang-orang yang mengikuti ideologi apa pun di luar Islam berarti telah melanggar hukum Islam dan menentang Tuhan.³ Para penganut kelompok ini sendiri bukan entitas yang homogen. Di Indonesia, mereka terbagi secara organisasi dan berbeda pendapat mengenai beberapa persoalan. Namun, sebagian persepsi fundamentalis mengenai persoalan gender adalah sama—mereka pada umumnya memahami teks-teks keagamaan secara harfiah. Para penganutnya mungkin berasal dari masyarakat kolot/ konservatif, kelompok-kelompok radikal, fundamentalis atau revivalis seperti, FPI, Lembaga Dakwah Kampus (LDK), gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir dan gerakan Dakwah Salafi.⁴

Walaupun kelompok dominan yang menggerakkan ABI adalah kelompok yang mempunyai kecenderungan pemikiran tidak progresif seperti HTI, FPI, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), namun dalam kenyataannya yang hadir dari kalangan moderat juga banyak seperti para anggota Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Berdasarkan pengamatan di lapangan, kedatangan mereka bukan berarti mendukung kepemimpinan FPI untuk ummat Islam. Banyak di antara mereka yang

² Amin Abdullah, *Hermeneutic method*. Paper presented at the Short Course Southeast Asia: Islam, Gender and Reproductive Rights, 2002. lihat juga di Mubarak M. Zaki. *Geneologi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, pemikiran dan prospek demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.

³ J. Burhanudin & O. Fathurahman, *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004.

⁴ Mubarak, 2008, lihat juga di Y. Machmudi, *Islamising Indonesia: The rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: Australian National University, 2008.

sebenarnya dari kalangan Islam yang tengahan atau kelompok washotiniyah yang tidak ingin disebut sebagai orang yang “ANTI Islam”. Bahkan di beberapa tempat, suasana di Monas saat aksi 212 seperti festival karena dimana ada kerumunan maka di situ dapat dijadikan sebagai mengais rezeki. Juga banyak wajah ceria yang swafoto baik secara berkelompok maupun sendiri.⁵ Gambar 1 menunjukkan bagaimana keceriaan yang tergambar pada wajah para perempuan yang ikut berpartisipasi pada Aksi “Bela Islam” tanggal 2 Desember 2016.



Sumber: Kiriman WA

Sumber:acehtribunnews.com

Gambar 1: Keceriaan Perempuan dalam partisipasi Aksi “Bela Islam”

Berdasarkan denah aksi 212 di Monas pada Gambar 2, panitia memberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam aksi yaitu sekitar lebih dari 1/3 lokasi. Perlakuan secara umum terhadap perempuan juga memuliakan. Hal ini bisa jadi karena konsep perang, jika Aksi Bela Islam dikategorikan perang, maka memang konsep perang dalam Islam harus memuliakan anak dan perempuan. Namun di luar denah tersebut karena peserta membludak, maka segregasi laki-laki dan perempuan sudah tidak terlihat. Layaknya di Masjidil Haram bagian luar, laki-laki dan perempuan campur. Sebagai seorang perempuan, saat melakukan observasi partisipan, penulis juga tidak mengalami kendala. Bahkan penulis menunaikan sholat jumat diapit oleh bapak bapak.

⁵ Observasi, Aksi “Super Damai Bela Islam” di Monas Jakarta, 2 Desember 2016.



Gambar 2: Denah Lokasi Aksi “Bela Islam”

Namun jika diamati lebih detail, kebijakan yang diambil cenderung seperti Orde Baru yang memposisikan perempuan bukan sebagai bagian dari *top leader* yang mendapatkan panggung sentral, tetapi lebih pada peneguhan politik identitas para laki-laki. Istilah *State ibuisism* yang dikenalkan oleh Julia Suryakusuma dalam bukunya yang berjudul *Sex, Power and Nation*⁶ menyebutkan bahwa ideologi gender Orde Baru lebih menekankan model satu macam bentuk keluarga, yaitu istri *men-support* karier suami dan tidak sebaliknya. Pada acara ABI tidak ada tokoh perempuan yang menjadi narasumber atau mempunyai panggung utama dan dicover media. Kebanyakan peran perempuan di area logistik dan bersihbersih. Walaupun banyak juga laki-laki yang ikut andil juga di urusan

⁶ Suryakusuma, J. I. *Sex, power, and nation: An anthology of writings, 1979–2003*. Jakarta, Indonesia: Metafor, 2004, 161-188.

tersebut. Berikut salah satu laporan media Kabar Selebes terkait peran perempuan di area logistik di acara ABI.

“Massa aksi Bela Islam III, yang terpusat di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah, tampaknya cukup terbantu dengan keikutsertaan para perempuan berhijab Syar’i ini. Peralnya, dalam aksi super damai kali ini, mereka menjamin konsumsi para peserta aksi 2 Desember 2016, dengan menyediakan 2.000 bungkus makanan”.⁷



Sumber: tribunnews.com



<http://www.kabarselebes.com/2016/12/beginilah-cara-perempuan-berhijab-syari-dukung-aksi-bela-islam-iii-palu/>



<http://blog.al-habib.info/wp-content/uploads/2016/12/aksi-bela-quran-212-mo-nas-jutaan-muslim-tim-kebersihan-taman.jpeg>



Sumber: suara-Islam.com

Gambar 3: Peran Logistik dan Kebersihan Perempuan di ABI

Di antara cara menggerakkan perempuan adalah dengan memberikan fatwa yang disosialisasikan melalui media. Berikut salah satu contoh artikel terkait dengan hukum perempuan berdemo pada salah satu tabloid Media Umat yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yang menarik, walaupun perempuan boleh berdemo, tetapi ada empat syarat yaitu diizinkan suami, mengenakan busana muslimah, tidak *tabarruj* dan tidak mengeluarkan suara yang mengundang syahwat.⁸

⁷ *Kabar Selebes*, Beginilah Cara Perempuan Berhijab Syari Dukung Aksi Bela Islam III, <http://www.kabarselebes.com/2016/12/beginilah-cara-perempuan-berhijab-syari-dukung-aksi-bela-islam-iii-palu/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

⁸ M Shiddiq Al Jawi, Hukum Wanita Muslimah Ikut Demo, *Tabloid Media Umat*, edisi 184,4-17 Safar H/4-17 November 2016, 26.

Gambar 4: Hukum Muslimah berdemo



Sumber: Tabloid Media Ummat

Berita tentang keterlibatan perempuan dalam ABI tidak banyak dibahas dalam media *mainstream*, termasuk di Tabloid Media Ummat (HTI), Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah, dan SKH Kedaulatan Rakyat yang menjadi pilihan riset ini. Pada tulisan berikutnya akan dibahas bagaimana media tersebut melakukan *framing* pada isu ABI tersebut.

Kontestasi Ideologi Media pada Aksi “Bela Islam”

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana media melakukan *framing* terhadap Aksi “Bela Islam”. Analisis *framing* bisa diartikan bahwa media membingkai suatu peristiwa yang disadur dari sebuah realita, kemudian realita peristiwa tersebut dikonstruksi oleh media. Realita yang telah lahir atau tercipta dalam konsep semuanya telah dibuat oleh wartawan atau pembuat berita. Baik segala bentuk fakta, peristiwa, kejadian, semuanya telah dinarasikan atau diabstraksikan menjadi sebuah berita dan informasi yang kemudian dipublikasikan kepada khalayak luas (masyarakat). Dari situlah masyarakat mulai mengakses, apa yang diberitakan dan diinformasikan oleh media dan menerima jika memang itu adalah sebuah kebenaran tanpa tahu jika itu adalah realita yang sudah dikonstruksi oleh media. Pada dasarnya dalam penggunaan analisis *framing* ini adalah harus dilihat terlebih dahulu bagaimana sebuah media mengkonstruksi sebuah realita/fakta. Sebuah sikap dukungan atau bukan dukungan, negatif ataupun positif, semuanya hanyalah sebagai efek dan bingkai yang dibangun oleh media, bukan semata-mata ciri khas atau keadaan yang nyata seperti apa yang ada.⁹

Sedangkan dalam analisis kali ini, penulis menggunakan analisis *framing*nya Robert N. Entman, dimana dalam analisis *framing* Entman lebih menonjolkan pada seleksi isu dan penonjolan aspek dari fakta tertentu. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan 4 kerangka secara spesifik: *Define Problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause*

(memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Dari pemilihan isu dan menonjolkan aspek tertentu dari situasi sebuah peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, kemudian wartawan menentukan porsi-porsi tertentu yang akan dimasukkan dalam kolom berita baik apa yang akan dimuat, diliput, dibuang, disembunyikan dari khalayak, dan apa yang akan ditonjolkan. Semuanya telah disusun secara sistematis tanpa ada kecurigaan masyarakat bahwa berita yang disajikan merupakan hasil konstruksi dari sebuah fakta di lapangan.¹⁰ Selain itu juga akan dipaparkan data-data visual pada empat media cetak yang dipilih yaitu, Tabloid Media Umat, Majalah Gontor, Majalah Suara Muhammadiyah dan SKH Kedaulatan Rakyat.

1. Tabloid Media Umat Edisi 184,4.17 Nov 2016, Hal. 1-17.



9 Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 7.

10 *Ibid*, hlm. 221-224.



Nasib Para Penghina Islam

Sejak Nabi SAW diutus sebagai Rasul, penghinaan terhadap Islam sudah muncul dengan berbagai bentuknya. Penghinaan itu ditujukan kepada diri Rasul maupun ayat-ayat Allah. Beberapa di antaranya:

Nama	Ulah	Kebijakan	Tindakan
Abdullah bin Ubay bin Salu	Menghina Nabi SAW dan kaum Muslimin. Dikenal sebagai biangnya orang munafik	Dibiarkan oleh Nabi "Agar tidak ada orang yang berkata Muhammad membunuh para sahabatnya"	-
Abhahah Ibnu Ka'ab Ibnu 'Auf Al-Aswad Al-Ansi di Yaman	Mengaku sebagai Nabi	Perintah bunuh melalui surat	Dibunuh oleh seorang bernama Fairuz
Musailamah Al-Kadzdzab dari Najed	Nabi palsu	Perangi	Dihabisi di zaman Khalifah Abu Bakar
Ka'ab Ibnu Al-Asyraf	Menghina Nabi SAW	Perintah bunuh	Dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah
Abu Rafi' Abdullah Ibnu Abi Al-Huqalq	Menghina Nabi	Perintah bunuh	Dibunuh oleh beberapa orang Anshar
Perempuan hamba sahaya	Selalu hina Nabi	-	Dibunuh oleh suaminya sendiri yang tunanetra. Nabi menyebut wanita itu layak dibunuh dan suaminya dibebaskan
Wanita Yahudi	Selalu hina Nabi	-	Dicekik oleh seorang Muslim. Nabi menyatakan kehalaian darah

- a. Pendefinisian masalah. Ahok harus dijadikan tersangka
 - Fatwa MUI bahwa Ahok harus diproses hukum karena: “Nistakan Agama Islam dan Nodai Al-Qur’an”
 - “Hinakan Ulama dan Lecehkan Ummat”
- b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah. Adanya isu wacana politik, sehingga Ahok belum disahkan sebagai tersangka, sehingga dalam hal ini polisi ragu, padahal tidak ada wacana politik sedikitpun. Polri harus benar-benar profesional, tanpa harus izin kepada Presiden terkait dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Seharusnya Polri melihat ini sebagai masalah hukum. Jika Polri tidak segera bertindak maka dengan adanya kasus penistaan agama ini akan membuat umat Islam berada pada puncak kekesalan terhadap Ahok. Selain itu, dalam kasus ini ada intervensi dari Pemerintah, jadi tidak diherankan lagi jika ada pengulangan-pengulangan waktu dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada Ahok.
 - Secara linguistik/bahasa, di dalam media umat ini terlihat sangat kanan dalam pemikirannya sangat keras sekali. Sehingga bisa dikatakan ini adalah media garis keras yang ketika melihat atau menyikapi kasus terkait dengan agama, umat, kitab suci dan ulama akan ditindak secara adil sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.
- c. Membuat keputusan moral. Pemerintah dan Polri tidak profesional dalam menangani kasus Ahok.
 - Kasus penistaan Agama bisa memicu kekisruhan besar.
 - Jika Ahok tidak menjadi tersangka itu menunjukkan bahwa Negara melindungi Ahok, ini menjadi bukti yang sangat nyata, bahwa hukum di Negara ini mandul karena telah tunduk dengan kekuasaan.
 - Tuntutan umat terus mengalir, walaupun klarifikasi Ahok dengan mendatangi Bareskrim Mabes Polri pun tidak menyurutkan niat kaum muslimin untuk terus mendesak pemerintah.
 - Dan dinyatakan bahwa pemimpin kafir itu haram.
- d. Menekankan penyelesaian. Sebaiknya Polri dan Pemerintah bertindak tegas dalam menyikapi permasalahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
 - Meminta dengan tegas kepada Presiden dan Polri untuk segera dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menangkap dan memproses hukum bagi Ahok.
 - Sebagai pelaku atau oknum yang sudah menistakan agama apalagi orang kafir maka hukumannya adalah mati.

Pembahasan

Berdasarkan dari data visual dan teks yang ada dalam Tabloid Media Umat dan juga jumlah artikel, berita dan juga gambar-gambar yang dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada negosiasi terkait dengan kasus Ahok yang dianggap sebagai penista agama. Pilihan kata yang digunakan juga mempunyai intensitas yang tinggi seperti “harus tersangka”, “wajib marah” dan juga “perangi”. Di Media Umat ini terlihat tidak ada kenetralan, karena jelas dinyatakan bahwa tidak ada ampun bagi penista agama. Hal ini

dapat dipahami karena Media ini adalah media yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi salah satu penggerak dalam Aksi “Bela Islam”.

2. Majalah Gontor: Media Perekat Umat.

Untuk Majalah Gontor ada tiga edisi yang terkait dengan Isu kepemimpinan dan Aksi “Bela Islam”, yaitu:

- a. Pemimpin Muslim Lebih Baik, Edisi 11 Tahun XIII Rajab-Sya’ban 1437/ Maret 2016, Hal.9-12
- b. Pesan di Balik Aksi Damai, 411, Edisi 08 Tahun XIV Safar-Rabiul Awal 1438/Desember 2016, Hal, 9-
- c. Pemimpin Muslim yang Lebih Adil dan Lebih Baik, Edisi 09 Tahun XIV Rabiul Awal-Rabiul Akhir 1438/Januari 2017, hal. 6-66.



a. Pendefinisian masalah

- Pemimpin Muslim lebih baik dan bahaya memilih pemimpin non-muslim. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).

- Ada pesan dibalik aksi damai 411: Demonstrasi muslim terbesar di Indonesia yang damai
 - Penista Agama Wajib dihukum
 - Ghirah Iman Penggerak Aksi Damai 411.
 - Kepleset Lidah Gubernur Penista Al-Qur'an. (Majalah Gontor, Edisi 08 Desember 2016).
 - Pasca bela Islam 212: Kontroversi di balik Aksi Bela Islam 212, antara penguasa, tokoh agama dan umat.
 - Sikap terhadap Aksi Bela Islam.
(Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).
- b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah
- Kepemimpinan Muslim didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 51, QS. An-Nisa:139, QS. An-Nisa ayat 144. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
 - Ada kecenderungan umat memilih pemimpin non-muslim boleh jadi karena mereka tidak mengetahui larangan Allah ini, karena itulah tugas Ulama, Da'i atau Kiyai untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini kepada mereka agar mereka tidak salah pilih. Belum banyak informasi adanya pemimpin muslim yang berkualitas, amanah, dan memiliki integritas tinggi.
 - Jika kepemimpinan dipegang oleh non muslim, walaupun sekilas dinilai baik, namun mereka tidak akan mau mengurus tentang permasalahan miras, perzinaan, dan lain-lain. Sebagaimana fenomena kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ahok atau yang memiliki nama asli Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Solo, Fransiskus Xaverus Hadi Rudyatmo, yang keduanya adalah non-muslim. Selama sebagai orang nomor satu di daerah yang mayoritas muslim, banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversi karena menyimpang dari ajaran Islam. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
 - Sebelum aksi damai 212 sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 411 yang bertepatan pada 4 November 2016 sebagai tuntutan umat kepada Presiden agar memberikan hukuman pada penista Agama. Secara khusus pada Aksi Bela Islam 2 ini menoreh pesan yang berarti bagi umat Islam. Karena bentuk solidaritas, kebersamaan, kepedulian antar umat tanpa memandang usia, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kesejukan dan kedamaian seolah terlihat jelas di dalamnya. Semua bersatu tanpa ragu. Dan tidak terlihat kerusuhan atau bentrok. Ada pesan tersirat yang dikemukakan oleh Ketua GNPf-MUI Bachtiar Nasir: "aksi 411 bukan gerakan politik", "peserta aksi damai harus menjaga persatuan Indonesia, dan ukhuwah Islamiyah, hindari anarkisme dan jangan merusak fasilitas umum karena gerakan kita adalah gerakan menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Bukan gerakan politik!" (Majalah Gontor, Edisi 08 Desember 2016).
 - Aksi bela Islam 3 ini ternyata telah menyulut kecemasan penguasa terhadap umat yang berhimpun menjadi satu kesatuan di Monas Jakarta. Sampai pada prosesnya pihak POLRI, POLDA telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah umat muslim mengikuti Aksi III (ABI), seperti menyebarkan flyer melalui Helikopter di

Jakarta, adapun isi flyer tersebut menyerukan agar umat tidak berhimpun di MONAS. Selain itu POLRI juga mengirimkan surat resmi kepada POLDA di berbagai daerah di Indonesia, begitupun dengan POLDA yang menemui para pengusaha bus, toko-toko Islam agar umat tidak ikut dalam acara Aksi Bela Islam III. Tujuan ini dilakukan agar masa yang ikut berjumlah sedikit. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

- Ternyata ada hal yang menarik dalam ABI III ini, beberapa tokoh agama seperti Gus Mus (K.H. Mustofa Bisri), K.H. Said Agil Siradj (Ketum PBNU), dan lain-lain ternyata senada atau sependapat dengan penguasa bahwa umat dilarang datang ke Jakarta untuk membentuk suatu himpunan. Selain itu dari oknum-oknum NU juga ada yang mengatakan bahwa shalat jum'at di jalana itu sama saja bid'ah. Penguasa juga melalui kapolri menghimbau kepada masyarakat/umat agar acara Aksi Bela Islam III di gelar di MONAS yang pada awalnya akan diadakan di bundaran HI. Dari sinilah mulai muncul juga adanya kontroversi antara umat, tokoh agama dan penguasa. Bukan itu saja, ternyata kontroversi tersebut juga muncul dari dalam tubuh Islam itu sendiri. Seperti apa yang dikemukakan oleh Pimpinan Majalah Gontor (Adnin Armas), kritiknya walaupun dengan jumlah fantastis umat Islam berkumpul menjadi satu di Aksi Bela Islam III, apakah aksi serupa dengan berkumpulnya umat dengan jumlah yang banyak akan terulang kembali? Dirasa sulit hal itu akan terulang kembali dengan porsi yang sama, karena sesama umat Islam itu sendiri saja masih berbeda paham baik mengenai masalah-masalah furuuiyyah, aspirasi politik, ormas, atau berbagai kepentingan ekonomi, dan sebagainya yang selama ini dipandang sebagai salah satu faktor yang menjauhkan umat dengan sesama saudara seiman. Himpunan yang terlihat dalam ABI 3 hanyalah bentuk dari pada kuantitas umat Islam. Dengan demikian, masih banyak sudut-sudut yang memang menunjukkan umat Islam masih lemah dalam segi kualitas baik dalam ekonomi, politik, pendidikan, budaya, media dan di berbagai aspek. Sebenarnya potensi itu ada tapi karena belum berada di dalam satu komando. Walaupun dikatakan bahwa Islam di Indonesia merupakan bagian terbesar di dunia sekalipun. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

- Untuk mengetahui sikap Majalah Gontor terhadap Aksi Bela Islam. Akhi bisa menyimak isi majalah ini. Edisi Desember Majalah Gontor bahkan mengangkat laporan utama bertajuk “Pesan di Balik Aksi Damai 411”.

Di luar itu masih ada sejumlah tulisan yang isinya dukungan terhadap Aksi Bela Islam. Diantaranya bertajuk: “Siap Mati Demi Bela Al-Qur’an”, “Penista Agama Wajib dihukum”, dan “Penghina Nabi dan Hukumannya”.

Selain memberikan dukungan melalui media pemberitaan, baik melalui Majalah Gontor.com, kami juga memberikan dukungan secara langsung dengan ikut menjadi peserta aksi dan dukungan logistik. Kendati tidak ada himbuan untuk mengikuti Aksi Bela Islam, namun hampir semua kru dan manajemen Majalah Gontor ikut turun ke lapangan, baik aksi 411 maupun aksi 212. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

c. Membuat keputusan moral

- Di dalam media cetak Gontor terlihat bahwa pemimpin muslimlah yang baik untuk memimpin suatu daerah ataupun Negara, bukan dari kalangan non-muslim, seperti yang terjadi pada kepemimpinan DKI Jakarta dan Solo. Perbandingannya salah satunya dengan pemimpin muslim di di Surabaya, yang dipimpin oleh orang muslim. Hal ini dianggap lebih baik karena umat yang dipimpin mayoritas muslim. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari sosok pemimpinnya. Ketika sang pemimpin mampu berpegang teguh pada syariat Islam, niscaya kemaslahatan rakyat akan terwujud. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Aksi bela Islam III (ABI) pada 2 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia) memang sangat fenomenal dan menarik banyak perhatian. Jutaan umat berkumpul menjadi satu tanpa adanya kerusuhan (damai). Dari peristiwa tersebut setidaknya umat Islam mampu bekerjasama dan bekerja keras meraih tujuan bersama agar kehidupan umat Islam menjadi lebih baik. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

d. Menekankan penyelesaian.

- Sebaiknya yang menjadi pemimpin di daerah ataupun negara berasal dari orang Islam bukan non-muslim. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Seharusnya Menteri Dalam Negeri menegur Ahok. Kalau sudah tiga kali menegur tidak diindahkan, diberhentikan dengan
- membuat surat rekomendasi kepada Presiden.
- Membangun kebersamaan antara semua golongan baik dari kalangan masyarakat biasa, ulama, bahkan sampai tokoh nasional sekalipun. (Majalah Gontor, Edisi 08 Desember 2016).
- Umat Islam merajut kesatuan, menyambungkan semangat dan etika kebersamaan.
- Umat harus mengedepankan sikap simpati dan empati kepada sesama umat Islam. Selain bekerjasama, gotong-royong, penuh pengorbanan, kesungguhan terhadap agama, ulama serta nilai-nilai mulia.

Pembahasan

Berdasarkan data gambar, judul artikel maupun isi dari teks yang ada di tiga majalah Gontor, menunjukkan bahwa gaya bahasa atau linguistik di media ini tidak sekeras bahasa yang ada di dalam Media Umat, walaupun keduanya samasama setuju dan mendukung pada Aksi “Bela Islam” (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016). Intensitas bahasa yang digunakan tidak sekuat di Media Umat, bahkan masih ada bahasa bahwa yang disampaikan oleh Ahok dengan kata “Lidah Kepleset”, artinya ada unsur ketidaksengajaan.

Artikel-artikel yang ada lebih banyak membahas kepemimpinan muslim daripada isu Penista Agama, walaupun di Majalah disampaikan bahwa mereka mendukung ABI, tapi sebenarnya di Pondok sendiri tidak terlalu ada pembahasan bahkan tidak ada

pengerahan untuk ikut ABI di Alun-alun Ponorogo.⁹ Selain itu jumlah artikelnyapun juga tidak sebanyak artikel yang ada di Media Umat.

3. Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan

“Aspirasi Umat Tersumbat”, Edisi No. 01 TH Ke-102, 1-15 Januari 2017.



a. Pendefinisian masalah

- Refleksi Pasca Bela Islam. ABI dikarenakan tersumbatnya aspirasi Islam dan juga karena adanya perbedaan pandangan antara umat Islam dalam melihat ABI, dan belum adanya persatuan umat Islam.

b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah

- Tiga rentetan Aksi Bela Islam yang puncaknya pada 2 Desember atau yang dikenal sebagai aksi 212 sungguh mengagumkan. Kekuatan penggerakannya adalah aqidah. Yakni umat muslim yang keyakinan agamanya terluka akibat oleh Ahok. Denyut nadi keagamaan mayoritas umat Islam yang masih direndahkan, dilecehkan dan dinodai bergelora menjadi kesadaran kolektif. Dorongan aksi tersebut terjadi bisa dikatakan sebagai motif politik, karena musuh yang dihadapi sama, yakni non muslim (Ahok). Semua organisasi Islam dari berbagai aliran atau kelompok saling bernegosiasi untuk menyampaikan aspirasi umat sesuai koridor hukum, demokrasi dan perilaku.
- Jika mengaca pada sejarah, masa-masa berdirinya Republik ini, umat Islam berdarah-darah memperjuangkannya. Akan tetapi tidak lama setelah kemerdekaan diraih tepatnya pada tahun 1948, justru umat Islam menjadi korban keganasan

⁹ Wawancara dengan Santri Gontor 2, Ahabullah Fakhri Muhammad, tanggal 27 Januari 2017.

komunis. Setelah pembantaian terjadi akhirnya umat Islam melawan dan menumpas PKI. Perjuangan umat Islam tidak dapat diremehkan. Bagaimanapun umat Islam adalah penduduk mayoritas di Negeri ini. Walaupun demikian kondisi umat sekarang sudah sangat terjepit, baik ekonomi maupun politik. Sumbatan aspirasi tersebut akhirnya meminggirkan peran umat Islam dalam semua aspek berbangsa dan bernegara. Umat Islam hanya menjadi penonton dan penikmat beragam suguhan produk ekonomi, tingkah laku politik dan perilaku budaya ini disebabkan oleh umat Islam yang kurang mampu menyatukan gerak dan visinya untuk umat dan bangsa. Mereka mudah dipecah belah oleh pihak lain. Maka untuk mengembalikan kekuatan Islam, perlu ada kohesifitas kekuatan. Perlu ada negosiasi untuk saling.

c. Membuat keputusan moral

- Dari aksi damai tersebut dapat dilihat tidak hanya sebagai eksistensi satu kelompok Islam. Tapi aksi 212 diletakkan sebagai aspirasi seluruh umat Islam yang menuntut keadilan hukum atas penistaan agama. Jadi, setiap komponen Islam mulai belajar saling bernegosiasi untuk menyampaikan aspirasi hal tersebut ditandai dengan adanya kehadiran Presiden RI Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr (HC) HM Jusuf Kalla pada aksi tersebut menunjukkan sikap yang baik, meski pada aksi itu terdapat tokoh seperti Habib Rizieq yang sering disebut orang bergaris keras.

d. Menekankan penyelesaian.

- Dengan menyuarakan aspirasi yang sama, jangan sentuh wilayah keyakinan agama, serta tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu
- Kelompok Islam moderat boleh memberi catatan khusus terhadap kelompok Islam berhaluan keras untuk lebih memahami keragaman kultur umat dan rakyat Indonesia.
- Kekuatan umat harus disatukan, baik dalam gerak sektor ekonomi, politik bahkan keagamaan.
- Berdayakan dan satukan umat sekaligus membangun Indonesia yang berkemajuan.

Pembahasan

Suara Muhammadiyah tidak menggunakan bahasa yang bersifat kekerasan, tetapi lebih melihat akar persoalannya adalah karena relasi umat Islam dan pemerintah dan kekhawatiran akan keretakan umat Islam. Berdasarkan artikel dan judul-judul dalam Suara Muhammadiyah, terlihat bahwa media ini tidak mengutarakan bahwa kepemimpinan Non-Muslim atau masalah Penista Agama tetapi lebih membahas ABI pada isu-isu sejarah, solidaritas, politik-ekonomi, sosial, agama.

4. Kedaulatan Rakyat, 3 Desember 2016/ 3 Mulud 1950/Tahun LXXII No.067), Hal. 1-7.



- a. Pendefinisian masalah: Aksi Damai
- b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah:
 - Hal tersebut dipicu dengan adanya permasalahan dugaan penistaan agama, lalu muncullah bela Islam. Hal tersebut dilakukan dilaksanakan karena umat Islam merasa terusik, hingga pada akhirnya melakukan aksi damai yang luar biasa atau disebut aksi 212. Di dalam kegiatan aksi damai atau bela Islam 212 ini umat Islam melakukan dzikir dan do'a bersama, bahkan Presiden dan wakil presiden pun turut berpartisipasi dalam kegiatan dzikir dan do'a bersama.
- c. Membuat keputusan moral
 - Kegiatan bela Islam tersebut dilakukan dengan “aksi damai” yang dihadiri oleh kurang lebih 2 juta orang Islam.
 - Secara keseluruhan di dalam media ini juga aksi damai kemarin itu mendapatkan banyak pujian karena selain berlangsung aman, peserta juga sangat tertib.
 - Seperti apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya: “peserta juga memperhatikan kebersihan, sehingga sampah tidak terlihat berserakan.”
- d. Treatment Recommendation. Terkait dengan bela Islam 212/aksi damai tersebut tidak ada rekomendasi yang jelas.

Pembahasan

SKH Kedaulatan Rakyat terlihat netral dan hanya memberitakan dengan posisi netral. Secara umum gerakan Aksi Bela Islam dalam media ini terlihat netral. Karena hanya menonjolkan Aksi Bela Islam 212/aksi damai saja. Pilihan katanya juga tidak kontroversi seperti Media Umat dan Majalah Gontor.

Berdasarkan empat media cetak di atas, isu perempuan tidak dominan, bahkan hanya Media Umat yang memuatnya dengan tujuan mobilisasi—karena mengatakan bahwa hukum demo bagi perempuan boleh. Hampir tidak ada yang secara khusus

memperbincangkan perempuan pada Aksi Bela Islam baik di media konvensional maupun di media sosial. Karena yang paling dominan adalah isu agama dan politik. Bisa dikatakan bahwa ABI adalah aksi maskulinitas. Walau banyak yang berargumen bahwa aksi super damai 212 adalah bukan aksi politik, namun saat wawancara dengan beberapa warga Jakarta yang punya hak pilih di Pilkada mereka mengatakan bahwa “Pilkada DKI tidak ada duanya, maksudnya tidak ada nomer duanya yang ada 1 dan 3 yang Muslim”.¹⁰ Walaupun dengan nada canda saat menyampaikan hal tersebut dengan spontan.

Khotbah Habib Rizieq juga menekankan bahwa al-Qur’an itu suci sehingga harus di atas konstitusi dan Al Maidah 51 harus ditegakkan. Artinya pemimpin harus Muslim, menurut ketua FPI tersebut. Selain itu, jika disimak pidato Kapolri yang menyatakan bahwa polisi berani membuat Ahok tersangka. Padahal KPK yang sudah beberapa kali memeriksa Ahok, namun Ahok tidak pernah jadi tersangka. Hal ini menguatkan persetujuan KPK dan Polri belakangan ini. Kehadiran RI 1 dan 2 yang rela berjalan di tengah hujan sepanjang 200 meter, menunjukkan usaha *scalling up* secara politis yang perlu dicatat. Hal ini menarik mengingat banyak peserta yang beranggapan bahwa RI 1 melarikan diri. Karena jangkauan *sound system* yang tidak memadai sebagian jamaah, bahkan tidak tahu kalau bapak presiden hadir. Baru tahu setelah melihat TV.¹¹ *Scalling up* yang dilakukan bapak Presiden sebelum sampai pada keikutsertaan dalam sholat jumat 212 adalah upaya safari ke sejumlah ormas, orpol, TNI, POLRI dan juga sejumlah tokoh Nasional. Setidaknya ada 16 kunjungan atau silaturahmi yang dilakukan oleh Jokowi sejak peristiwa 411 sampai 212, di antaranya PB Nadlatul Ulama, PP. Muhammadiyah, Munas LDII, PKB, PAN, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra yang mana ada tokoh nomer 1 di masing-masing ormas atau partai ataupun TNI dan POLRI yang diajak diskusi.

Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang ada dapat disimpulkan bahwa peran perempuan di Aksi “Bela Islam” (ABI) lebih dominan pada posisi logistik dan kebersihan. Memang ada perhatian pada perempuan dengan disediakan area khusus bagi perempuan di lebih dari 1/3 (sepertiga) lokasi saat ABI di Monas. Peran lain perempuan adalah sebagai penggembara dan bahkan “asesoris” yang ditandai dengan keceriaan dalam foto-foto yang beredar di media sosial. Istilah ABI yang mengacu pada “ayah” dalam bahasa Arab menegaskan bahwa ABI adalah dunia laki-laki sebagai sentralnya, karena pada realitasnya yang mendapatkan panggung utama adalah laki-laki.

Berdasarkan data baik berupa gambar, visual dan juga teks yang ada pada media cetak: Media Umat, Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah dan juga SKH Kedaulatan Rakyat, menunjukkan bahwa Media Umat sangat gigih dan sangat mendukung ABI dengan menggunakan bahasa yang mempunyai tingkat intensitas tinggi, seperti Ahok Harus Tersangka, Umat Wajib Marah. Sementara Majalah Gontor lebih menekankan pada isu

¹⁰ Wawancara dengan Arif, 12 Desember 2016

¹¹ Observasi partisipan, 12 Desember 2016

kepemimpinan yang mana pemimpin Muslim lebih baik. Walaupun secara substansi mendukung ABI, namun terdapat artikel yang memperlihatkan ada unsur ketidaksengajaan seperti “Kepleset Lidah”. Selain itu pilihan katanya tidak sepedas pilihan kata di Media Umat. Untuk Suara Muhammadiyah lebih menekankan pada kekhawatiran pecah belahnya umat Islam sehingga perlu ada seruan bersatu. ABI, menurut Suara Muhammadiyah, lebih disebabkan karena tersumbatnya aspirasi umat Islam dan juga ketidakadilan pada umat Islam. Terakhir, SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan sikap netral pada ABI. Bahkan tidak ada rekomendasi yang jelas terkait dengan isu Aksi “Bela Islam”.

Akhirnya, menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan akan berubahnya Islam yang damai dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi Islam yang anarkis dan diskriminatif. Walaupun hal ini tetap menjadi kewaspadaan karena jika Islam berhaluan keras mendominasi dan berpengaruh besar di masyarakat, maka dapat dipastikan kehidupan perempuan Islam Indonesia menjadi kurang beruntung. Variatifnya media yang kebanyakan masih menunjukkan Islam Indonesia yang santun memperkuat argumen bahwa Islam Indonesia Insya Allah tidak akan mudah diceraiberaikan.



Daftar Pustaka

- Abdullah Amin, Hermeneutic method. Paper presented at the Short Course Southeast Asia: Islam, Gender and Reproductive Rights, 2002. lihat juga di Mubarak M. Zaki. *Geneologi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, pemikiran dan prospek demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Burhanudin, J., & Fathurahman, O. *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Iseologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKis, 2011.
- Kabar Selebes, *Beginilah Cara Perempuan Berhijab Syari Dukung Aksi Bela Islam III*, <http://www.kabarSelebes.com/2016/12/beginilah-caraperempuan-berhijab-syari-dukung-aksi-bela-islam-iii-palu/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
- Mubarak, 2008, lihat juga di Machmudi, Y. *Islamising Indonesia: The rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: Australian National University, 2008.
- Qibtiyah Alimatul, “Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement.” *Journal of Indonesian Islam*. 03.01 (2009): 168-196.
- Suryakusuma, J. I. *Sex, power, and nation: An anthology of writings, 1979–2003*. Jakarta, Indonesia: Metafor, 2004, 161-188.
- M Shiddiq Al Jawi, *Hukum Wanita Muslimah Ikut Demo*, *Tabloit Media Umat*, edisi 184,4-17 Safar H/4-17 November 2016, 26.

AKSI DAMAI 411-212, KESALEHAN POPULER, DAN IDENTITAS MUSLIM PERKOTAAN INDONESIA

Muhammad Wildan

Abstrak

Artikel ini akan melihat Aksi bela Islam 411 dan 212 dari perspektif budaya populer. Tidak sedikit pengamat dan akademisi yang cenderung melihat demonstrasi jutaan Muslim ini sebagai puncak dari merebaknya konservatisme di Indonesia. Bahkan sebagian yang lain menganggap bahwa pengaruh ideologi salafisme dan Islamisme sudah sedemikian menyebar luas di negara yang dikenal santun dan toleran. Namun globalisasi dan demokratisasi yang berbarengan dengan Islamisasi telah membentuk gugus kelas menengah Muslim yang terus tumbuh dan berkembang. Artikel ini cenderung melihat bahwa aksi damai jutaan manusia itu didominasi oleh kelas menengah Muslim perkotaan yang notabene berpendidikan dan berpikiran moderat. Walaupun Islamisasi telah mengarahkan Indonesia pada Islam yang lebih konservatif (puritan), namun Islamisme dan ekstremisme bukanlah masa depan Islam Indonesia.

Kata Kunci: Muslim perkotaan, Kesalahan populer, konservatisme, postIslamisme.

Pendahuluan

Demonstrasi kolosal yang lebih dikenal dengan Aksi Damai 411 dan 212 menysaikan banyak hal menarik. Selain karena aksi itu diikuti oleh jutaan orang yang datang dari berbagai daerah dengan berbagai moda transportasi, aksi itu juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Genderang yang ditabuh oleh Habieb Rizieq sebagai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) diikuti dan

188

diamini oleh hampir semua organisasi Islam baik secara individu maupun organisasi. Di luar tuntutan politis untuk segera menghukum Ahok yang diduga menistakan agama (#PenjarakanAhok), aksi damai ini bisa dilihat dari beberapa perspektif di antaranya adalah dari budaya populer.

Di tengah maraknya Islamisasi Indonesia dan juga penetrasi Islam transnasional, Islam perkotaan mulai menjamur dan menampilkan eksistensinya. Secara umum bisa ditengarai bahwa Aksi Bela Islam I hingga III lebih banyak diwarnai oleh kelompok Muslim perkotaan. Di tengah memudarnya batasan-batasan Islam tradisional, gugus Muslim moderat perkotaan mulai terbentuk seiring dengan munculnya banyak program keagamaan di televisi dan ustaz seleb.¹² Isu politik saja mungkin tidak akan cukup untuk menarik jutaan orang ke Jakarta, tapi karena dibarengi isu etnis dan agama. Oleh karena itulah, aksi damai yang berawal dari isu pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta bisa menjadi isu nasional yang bisa jadi terus berkembang dan bahkan melebar ke isu yang lain.

Secara umum banyak pihak yang menengarai bahwa Aksi Bela Islam 411 dan 212 ini merupakan puncak dari konservatisme Islam Indonesia. Walaupun Islam Indonesia sudah banyak dikenal sebagai Islam yang telah mengalami pribumisasi sehingga ramah dan toleran, sejak akhir 1990-an bisa ditengarai bahwa Islam Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Beberapa kasus intoleransi, konflik antar agama-etnis, hingga kekerasan (*violence*) atas nama agama (Islam) telah merubah wajah Islam Indonesia.¹³ Di sisi lain, Indonesia memang sedang mengalami proses demokratisasi dimana intoleransi dan konflik bisa jadi merupakan bagian dari dinamikanya, yaitu pencarian kembali identitas negara-bangsa Indonesia. Jika demikian, masa depan Islam Indonesia menarik untuk dikaji khususnya dari perspektif gugus baru Muslim Indonesia.

Re-Islamisasi, Konservatisme, & Gaya Hidup Beragama

Sejak awal 1980-an, re-Islamisasi sudah mulai marak dan berkembang. Depolitisasi Islam sejak tahun 1970-an telah mendorong Muslim Indonesia untuk lebih mengedepankan kesalehan pribadi daripada aktif di ranah politik.

Sejak itulah gugus Muslim perkotaan yang jauh dari hingar-bingar politik mulai terbentuk. Proses re-islamisasi mulai menyeruak masuk Indonesia tahun 1980-an ketika Saudi Arabia melalui *Rabithah 'Alam Islami* (RAI) mengintensifkan dakwah di Indonesia melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII)-nya Mohammad Natsir (m.1993). Reformasi di akhir abad ke-20 telah menghantarkan Muslim Indonesia untuk lebih terlihat di ranah politik dan juga publik. Hal ini

¹² Bisa jadi berbeda dengan definisi ustaz seleb yang bagus, media ustaz yang formal yang Heryanto, hlm. 55.

¹³ Greg Fealy & Indonesia Kontemporer. Sally White, *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Komunitas Bumbu*, 2012, hlm. 1.

juga didorong oleh globalisasi dan modernisasi dimana Islam trans-nasional semakin mempengaruhi corak Islam nusantara. Dalam perspektif budaya populer, modernisasi, globalisasi, dan re-islamisasi saling berkelit-berkelindan membentuk pola baru beragama dimana seorang Muslim bisa menjadi modern dan taqwa pada saat yang sama.¹⁴

Euforia reformasi telah membuka katup-katup demokratisasi. Di ranah politik, menjamurnya partai Islam pada pemilu 1999 hingga 2009 telah membuktikan “kerinduan” mendalam umat Islam akan politik. Organisasi-organisasi sosial keagamaan juga tumbuh dan berkembang seiring dengan keinginan umat Islam untuk dapat terlibat dalam pembentukan kembali negara-bangsa Indonesia di tengah euforia demokratisasi.

Di ruang publik, Muslim Indonesia juga semakin menampakkan eksistensinya. Pertumbuhan spirit Islam yang sangat signifikan tidak hanya di bilik-bilik privat seperti di masjid dan fesyen Islami, tapi sudah muncul di ruang publik seperti program TV, bank Syari’ah, hotel Syari’ah, sekolah Islami, rumah sakit Islami, sertifikasi halal di gerai-gerai fastfood asing, wisata Islami dan lain-lain.¹⁵ Terlepas dari diskursus bahwa itu semua merupakan bagian dari komodifikasi dan komersialisasi agama, fenomena di atas menandakan semakin meningkatnya kesadaran religius masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, fenomena Islamisasi di berbagai ranah kehidupan juga bukan ‘pepesan kosong’ karena seberapapun dangkalnya artikulasi dan makna Islam tersebut tetap berpengaruh terhadap pemaknaan agama dan spiritualitas di beberapa segmen masyarakat, khususnya semakin kuatnya gugus Muslim perkotaan. Bagaimanapun, pertumbuhan kesadaran keagamaan dan segala bentuk kesalehan publik tersebut di atas tetap akan mempunyai pengaruh secara dinamis di level politik, sebagaimana disinyalir oleh Saba Mahmood terjadi di Mesir.¹⁶ Di tengah maraknya islamisasi ini, kontestasi dan dinamika Islam juga terus bergerak seiring dengan maraknya penggunaan internet dan media sosial. Penulis meyakini bahwa gugus Muslim perkotaan terus mengalami dinamika yang diperebutkan oleh banyak kutub-kutub Islam. Bahkan, ketaatan beragama dan kesalehan sosial menjadi ikon yang diperebutkan dan bahkan dikomersialkan.

Globalisasi dan modernisasi sebagai media transformasi sosial dan budaya telah merubah perilaku keagamaan masyarakat perkotaan secara dramatis hingga terguncangnya identitas

¹⁴ Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan....*, hlm. 38.

¹⁵ Greg Fealy, “Mengonsumsi Islam: Agama yang Dijadikan Jual dan Kesalahan yang Diidam-idamkan” dalam Greg Fealy & Sally White. *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012, hlm. 15-16.

¹⁶ Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. New Jersey: Princeton University Press, 2005, hlm, 193.

keagamaan mereka.¹⁷ Transformasi sosial-budaya secara global mengarahkan masyarakat modern untuk beragama secara eklektik dan bahkan *hybrid*. Di tengah memudarnya ikatan-ikatan Islam tradisional, pengaruh Islam global dan trans-nasional semakin menguat. Forum-forum majelis taklim sudah digantikan dengan grup-grup *online* di media sosial yang sarat akan pengetahuan dan dogma-dogma keagamaan.¹⁸ Walhasil, otoritas keagamaan juga mengalami perubahan signifikan. Dahulu, kyai atau ulama di level lokal merupakan tokoh yang paling otoritatif dalam hal agama. Dalam beberapa kasus, modernisasi agama telah merubah website dan ustaz seleb sebagai entitas yang paling otoritatif dalam agama.

Seiring dengan merebaknya dakwah Salafisme, literalisme yang merupakan salah satu karakter utamanya menjadi tantangan baru Islam Indonesia. Cara pandang bahwa interpretasi agama yang monolitik inilah yang sedang “mewabah” dalam masyarakat Islam Indonesia sebagaimana beberapa kasus radikalisme dan ekstremisme telah terjadi. Dikuatirkan, wabah konservatisme dan literalisme akan terus menggerogoti identitas Islam Indonesia karena sudah nyata pengaruhnya di beberapa lembaga agama negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun demikian, pada masyarakat modern seperti saat ini, perbedaan (diferensiasi) tetap merupakan tanda yang paling signifikan,¹⁹ termasuk dalam hal beragama. Dengan kata lain bahwa identitas Muslim khususnya perkotaan tetap sangat beragam. Oleh karena itu, agama bukan hanya merupakan sumber nilai dalam kehidupan, tapi lebih merupakan instrumen bagi gaya hidup beragama. Naik haji, sebagai suatu ibadah yang sangat sakral misalnya, telah dianggap oleh masyarakat Muslim modern sebagai bentuk *cultural strategy of self definition*.²⁰ Demikian pula ibadah-ibadah atau perilaku keagamaan lain, bisa jadi tidak hanya dipahami karena memiliki nilai etis-spiritual, tapi juga estetis.

Demonstrasi & Kesalehan Populer

Aksi Damai 411 dan 212 memang merupakan sebuah fenomena yang spektakuler. Sudah bisa dipastikan bahwa peserta aksi yang mencapai jutaan orang itu terdiri dari berbagai kelompok dan elemen masyarakat. Front Pembela Islam (FPI) yang semula sering dijuluki oleh sebagian orang sebagai organisasi ‘preman berjubah’ karena perilaku anarkisnya sontak menjadi heroik

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁸ Idi Subandy Ibrahim & Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Obor, 2014, hlm.152-153.

¹⁹ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 109.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 113.

dan dikagumi banyak pihak.²¹ Tidak mengherankan bila Habieb Rizieq yang selama ini dikenal sebagai tokoh agama “pinggiran” tiba-tiba menjadi tokoh agama sentral. Bahkan akhir-akhir ini beberapa tokoh agama mengangkatnya sebagai ulama dan bahkan imam besar umat Islam.²² Penulis melihat bahwa kasus ini bukan siapa yang mengusung isu (Habieb Rizieq), tapi lebih pada isu yang diusungnya itu telah menyentuh dan bahkan menantang identitas Muslim (penistaan agama).

Sejauh penulis amati dari aksi damai itu, ada beberapa hal menarik untuk dilihat dan dipelajari. Pertama, tidak sedikit peserta aksi damai itu yang tidak memahami substansi permasalahan. Didorong oleh dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagaimana didakwakan oleh MUI lewat “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” (bukan fatwa) serta Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) ribuan bahkan mungkin jutaan umat Islam berbondong-bondong datang ke Jakarta. Memang bisa dipahami bahwa mayoritas peserta aksi tidak mempunyai kapasitas keagamaan yang memadai untuk mengatakan pernyataan Ahok itu menistakan atau tidak. Partisipasi demikian banyak Muslim dalam aksi damai, menurut penulis, lebih banyak dipengaruhi sentimen agama. Agama itu masalah yang sangat prinsip dan bahkan sakral dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, walaupun keikutsertaan dalam aksi damai tidak bisa secara sederhana menjadi parameter dalamnya iman dan taqwa seseorang, tapi secara umum orang yang terlibat dalam aksi dianggap mempunyai komitmen Islam yang lebih tinggi. Jadi, keterlibatan dalam aksi damai 411 atau 212 berkaitan dengan identitas Muslim.

Kedua, walaupun tidak sedikit organisasi sosial keagamaan yang terlibat dalam aksi, namun hanya beberapa organisasi Islam moderat yang secara resmi mendukung aksi tersebut. Sejauh penulis menengarai, Muhammadiyah dan NU tidak mendukung aksi tersebut secara resmi, bahkan cenderung tidak setuju dan melarang anggotanya membawa atribut organisasi,²³ walaupun banyak tokoh maupun anggota organisasi-organisasi besar Islam tersebut yang terlibat dalam aksi. Dengan kata lain bahwa pro-kontra seputar aksi damai 212 juga cukup signifikan. Hal ini menyiratkan bahwa organisasi-organisasi Islam tersebut lebih meyakini mekanisme demokrasi yang lain untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk tetap memproses kasus hukum Ahok. Berbeda dengan Muhammadiyah dan NU, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekaligus

²¹ Sejarahnya, pembentukan FPI tidak bisa dilepaskan dari dukungan beberapa jenderal dan pimpinan polisi untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR November 1998. Lihat Robert W. Hefner, *Islam in Indonesia's Political Future*. Virginia: CAN Project Asia, 2002, hlm. 17.

²² Lihat <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/869375-reaksi-habib-rizieq-dikukuhkan-jadi-imam-besar-umat-islam> dan <http://www.tarbawia.com/2017/01/video-kiyai-sepuh-nu-baiat-habib-rizieq.html> [diakses tanggal 26 Januari 2017].

²³ Lihat <http://nasional.inilah.com/read/detail/2343444/muhammadiyah-apresiasi-aksi-212> dan <https://www.tempo.co/read/fokus/2016/11/22/3390/rencana-demo-2-desember-warga-nu-dan-muhammadiyahdiminta-tak-ikut> [diakses tanggal 26 Januari 2017].

organisasi dakwah ini secara resmi mendukung Aksi Bela Islam jilid III (212) dan juga agenda GNPf MUI untuk mengusut kasus Ahok hingga tuntas.²⁴

Ketiga, aksi damai 411 dan 212 diikuti oleh beberapa ustaz seleb seperti Abdullah Gymnastiar, Yusuf Mansur, Subkhi Al-Bughury, dan Felix Siauw. Sebagai ustaz yang sedang populer di masyarakat khususnya kelas menengah, mereka mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi massa khususnya untuk terlibat dalam aksi damai jilid II dan III itu. Di lain pihak, secara umum Muslim Indonesia kelas menengah sangat dekat dengan figur-figur ustaz seleb di atas. Keterlibatan beberapa ustaz populer tersebut secara langsung merupakan magnet bagi Muslim menengah untuk datang dan berpartisipasi di *event* yang sangat fenomenal tersebut, sekaligus bergabung bersama ustaz tokoh figur mereka. *Selfie-selfie* sesama peserta atau bersama dengan ustaz juga menegaskan fenomena budaya populer dalam Aksi Bela Islam tersebut dilakukan secara santai dan penuh kegembiraan.

Keempat, tidak sedikit saksi dan reportase yang menengarai bahwa aksi damai 212 mirip sebagai festival milik umat Islam atau lebih tepat disebut sebagai sebuah selebrasi. Di tengah kekecewaan sebagian umat Islam terhadap politik yang dimainkan Presiden Jokowi yang cenderung ke kiri, umat Islam mendapatkan momentumnya untuk bersatu bersama mengekspresikan aspirasi mereka dalam bentuk aksi damai. Ini juga bisa dianggap sebagai sebuah selebrasi kemenangan umat Islam. Jumlah peserta demonstrasi yang fantastis ini sangat membanggakan bagi peserta aksi dan juga romantisme 212 terus dilakukan oleh para peserta untuk aksi yang lain atau untuk mengkonstruksi wacana publik.²⁵ Ariel Heryanto mendefinisikan bahwa keramaian publik, parade, atau festival bisa dianggap sebagai bentuk budaya populer yang tidak ada hubungannya dengan industrialisasi atau suatu komoditas tertentu sebagaimana budaya populer yang lain.^{26 27}

Aksi bela Islam III (212) menandakan kekuatan publik dan absennya hegemoni negara. Walaupun sempat ada upaya-upaya “negara” untuk membatalkan aksi ini, namun resistensi masyarakat justru semakin banyak mengundang massa. Menurut psikologi massa, lautan manusia yang demikian banyak dalam aksi sangat rentan untuk berbuat kekerasan dan anarkis. Walaupun ada beberapa kasus kecil bentrok dengan aparat, media massa atau provokator, aksi ini terlaksana dengan super damai. Ini semua menandakan bahwa kekuatan nonnegara sangat dominan. Ini bisa menjadi parameter keberhasilan demokratisasi (bukan otoritarian) karena

²⁴ Lihat <http://pks.id/content/pernyataan-sikap-pks-terhadap-aksi-bela-islam-iii> [diakses tanggal 26 Januari 2017].

²⁵ Lihat <http://www.dobrak.net/2016/12/romantisme-aksi-212-kebanggaan-dan.html> [diakses tanggal 26 Januari 2017].

²⁶ Ariel Heryanto, *Identitas dan kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015, hlm. 27.

kelas menengah Muslim (bukan aristokrat) hadir dan menjadi mediator antara negara (birokrat) dan rakyat kecil (*grassroot*).

Identitas Muslim dan Demokratisasi Ruang Publik

Walaupun sebagian kelompok konservatif masih sibuk tarik-ulur apakah demokrasi kompatibel dengan Islam, aksi damai 411 dan 212 bisa ditengarai sebagai bagian dari euforia demokratisasi. Kegagalan Islam politik pada era Orde Lama dan Orde Baru direspon secara positif oleh umat Islam dan melahirkan pola perjuangan kultural yang akomodatif terhadap pemerintah mulai akhir Orde Baru. Lebih-lebih era reformasi telah membuka lebih banyak katup-katup demokrasi.

Era reformasi merupakan struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) bagi umat Islam Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembentukan kembali negara-bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa kelompok umat Islam untuk mendapatkan eksistensinya seperti wacana syari'ah Islam, khilafah, hingga maraknya perda syari'ah di berbagai daerah. Sejauh itu diperjuangkan di ranah publik, menurut hemat penulis itu sah-sah saja sebagai mekanisme dan dinamika demokrasi. Penulis juga berpendapat bahwa intoleransi, konflik, bahkan radikalisme yang terjadi di Indonesia sejak era reformasi merupakan bagian dari proses demokratisasi. Secara metafor, Sindhunata menggambarkan bahwa Indonesia di era reformasi ini bagaikan seorang ibu yang sedang hamil besar dan akan segera melahirkan "bayi besar", negara-bangsa Indonesia baru. Konflik dan kekerasan merupakan proses "sakit" bagi ibu yang sedang akan melahirkan bayi tersebut.²⁸

Di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wacana dan narasi publik dikontestasikan baik di ruang publik maupun dunia maya. Walaupun demikian, seiring re-islamisasi yang sedang marak di dunia secara global tidak diragukan bahwa ada indikasi dominasi Islam konservatif di ranah dunia maya dan media sosial. Sejauh bisa ditengarai, situs (website) dan konten media sosial dari kelompok Islam konservatif jauh lebih banyak dan intens daripada milik kelompok Islam moderat dan progresif. Penulis meyakini bahwa dalam konteks ini juga proses demokratisasi sedang berjalan; proses pencarian identitas Muslim Indonesia juga belum sepenuhnya selesai. Nilai-nilai agama yang interpretatif juga merupakan kontestasi yang idealnya bukan otoritas suatu kelompok tertentu. Inilah demokratisasi di ruang publik.

Walaupun demikian, tidak diragukan bahwa kelompok Islam moderat dan progresif juga cukup signifikan di negeri ini. Penulis meyakini bahwa kontestasi di ruang publik akhir-akhir ini kurang

²⁸ Lihat Sindhunata. *Sakitnya melahirkan demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

seimbang sehingga nampaknya kelompok konservatif dan Islamis jauh lebih dominan. Itu semua merupakan proses reproduksi nilai-nilai budaya (termasuk agama) dalam rangka pembentukan identitas Muslim Indonesia yang baru. Maraknya perda Syari'ah di beberapa daerah dan bahkan munculnya dewan Syari'ah di sebuah kota tidak bisa secara simplistik bisa dikatakan bahwa kelompok Islamis telah memenangkan kontestasi narasi publik.

Aksi damai 212 dan tuntutan untuk memenjarakan Ahok sejauh penulis amati masih dalam koridor demokratisasi (di ruang publik). Ketika katupkatup demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka aksi massal turun ke jalan merupakan cara yang paling sederhana untuk menekan para pengambil kebijakan dalam penegakan hukum. Di negara-negara yang paling demokratis sekalipun seperti di Amerika Utara atau di Eropa Barat misalnya, aksi turun ke jalan secara massal masih sering digunakan untuk menunjukkan kekuatan massa dan aspirasi rakyat banyak. Sejauh demonstrasi dilakukan tidak anarkis dan tuntutan juga sesuai dengan konstitusi, itu masih dalam koridor demokrasi. Semakin besar massa demo mungkin bisa menguatkan *pressure* terhadap pengambil kebijakan, tapi tidak bisa menjadi indikator kebenaran.

Kesalehan Populer dan Muslim Perkotaan

Re-Islamisasi di Indonesia sejak pertengahan Orde Baru telah berhasil menjadikan Muslim Indonesia lebih saleh (*pious*). Dua fenomena yang bisa menjelaskan proses transisi ini, yaitu kesalehan populer dan gugus Muslim perkotaan. Modernisasi khususnya dalam teknologi informasi telah merubah dengan cepat wajah Muslim Indonesia. Dulu pada paruh pertama Orde Baru Muslim cenderung takut untuk menampilkan identitas Islam mereka karena pemerintah lebih represif terhadap Muslim. Bentuk-bentuk visual dari budaya dan nilai-nilai Islam hampir bisa dipastikan tidak memungkinkan untuk ditampilkan secara publik.

Sejak 1990-an dimana umat Islam sudah mulai akomodatif, pemerintah Orde Baru mulai dekat dengan umat Islam. Pemerintah secara kontinu mendorong kesalehan pribadi dengan membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan juga menyelenggarakan berbagai *event* budaya Islam di tingkat nasional. Seiring dengan reformasi dan modernisasi teknologi informasi, berbagai fenomena Islam bermunculan baik itu di ruang publik maupun di media elektronik. Kesalehan yang semula lebih bersifat personal sudah mulai bergeser pada kesalehan populer (*popular piety*). Secara umum bisa dikatakan bahwa ketika nilai dan norma Islam sudah mulai bergeser dari etis-ideologis ke estetis, itulah kesalehan populer. Sebagai contoh, hijab tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban sebagai seorang muslimah, tapi juga sebagai sebuah tren berbusana modern. Demikian pula ibadah umrah dan haji bersama selebriti yang mulai menjamur diminati banyak kalangan. Terlihat adanya pergeseran makna haji dan umrah tidak

hanya bermuatan etis-ideologis, tapi juga pemenuhan kebutuhan estetis dan kesenangan (*pleasure*).

Demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi telah berpengaruh positif terhadap munculnya kelas menengah Muslim. Tidak disangkal lagi bahwa partisipasi Muslim sebagai warga negara mayoritas di Indonesia dalam pembangunan negara-bangsa telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara di satu sisi, dan juga terbentuknya kelas menengah Muslim di sisi yang lain. Pada tahap selanjutnya kelas menengah Muslim inilah yang paling berperan dalam pembentukan identitas Muslim baru dengan berbagai wacana dan diskursus naratif di sekitar mereka. Secara umum bisa dikatakan bahwa kelompok inilah yang disebut dengan kelas menengah Muslim perkotaan.

Kelas menengah Muslim perkotaan adalah gugus baru dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang paling cepat mendapatkan pengaruh globalisasi dan modernisasi di satu sisi, dan di sisi lain juga paling berpengaruh dalam narasi nasional Indonesia. Gugus baru inilah yang selain merupakan kelompok rasional atau terdidik, juga yang punya akses paling banyak dan cepat pada isu-isu nasional, termasuk politik. Sebagai Muslim perkotaan, yang ikatan-ikatan tradisional semakin memudar, visibilitas Islam di ranah publik dan kehadiran ustaz-ustaz seleb di ruang-ruang privat mereka telah menjadikan kelompok ini adalah yang paling “rentan” terhadap propaganda dan isu-isu sentimen ideologis.

Kelompok inilah menurut hemat penulis yang paling aktif dalam Aksi Bela Islam 411 khususnya 212. Secara praktis, gugus ini merupakan kelompok yang paling cepat mendapatkan informasi baik itu melalui media elektronik ataupun media sosial. Di sisi lain, kelompok ini juga yang paling banyak mengkonsumsi pengajian-pengajian ustaz seleb di media elektronik. Tidaklah mengherankan bila gugus kelas menengah Muslim perkotaan adalah yang paling dominan dalam aksi damai tersebut.

Pada tahap selanjutnya, kelompok ini juga yang paling cepat merespon pasca aksi damai. Dengan didukung oleh kekuatan media sosial, kelompok ini memanfaatkan spirit religiusitas 212 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam, yaitu mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan Muslim. Diantaraya adalah munculnya beberapa produk Islam seperti Koperasi Syariah 212, waralaba Muslim 212 Mart (M 212 M), Roti Maida (dari kata Al-Maidah, ayat yang diduga dilecehkan Ahok) dll. Itu semua akan memperkuat eksistensi kelas menengah Muslim perkotaan dan pada jangka panjang juga kekuatan ekonomi dan kapitalisme Islam.

Memenangkan Masa Depan Islam Indonesia

Aksi damai 411 dan 212 di satu sisi telah memukau berbagai kelompok Muslim, di sisi lain aksi ini juga mengagetkan beberapa pihak lain. Berbagai segmen umat Islam menyadari bahwa demonstrasi kolosal itu menyiratkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam Indonesia. Di sisi lain, beberapa pihak khususnya para sarjana dan pengamat kaget karena aksi damai 411 dan 212 bisa jadi merupakan indikasi perubahan peta Islam Indonesia menuju Islamis.

Tidak diragukan lagi bahwa sebagai bagian dari dunia global, Indonesia juga terpapar akan fenomena global islamisme-salafisme yang sedang menjangkiti seluruh dunia Muslim. Hal ini juga berbarengan dengan euforia demokratisasi yang juga masih menggema di negara ini. Modernisasi, globalisasi sekaligus Islamisasi sedang berlangsung bersama-sama di Indonesia. Berbeda dengan tren umum yang biasa terjadi di berbagai negara di Barat dimana modernisasi dan globalisasi selalu diikuti oleh rasionalisme dan sekularisme dimana agama termarginalkan,²⁹ modernisasi dan globalisasi di negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia ini dibarengi dengan maraknya spiritualisme dan konservatisme. Oleh karena itu, sebagian sarjana menengarai adanya *multiple modernity*, yaitu bahwa modernitas di dunia Muslim bisa jadi berbeda dengan modernitas di Barat.³⁰ Bahkan, kapitalisme yang selama ini sering dimusuhi oleh beberapa kelompok konservatif ternyata juga bisa hidup berdampingan dan bersekutu dengan agama (Islam).³¹ Meningkatnya konsumsi produk-produk keagamaan karena modernisasi dan kapitalisasi justru sering menjadi penanda mobilitas sosial.³²

Penulis meyakini bahwa gugus baru kelas menengah Muslim perkotaan tetap berjalan secara dinamis dan akan menjadi barometer Islam Indonesia. Sejauh kontestasi wacana di ruang publik terus berjalan (dan pasti akan terus berlangsung), penulis memastikan bahwa kelas menengah Muslim perkotaan akan tetap pada jalur moderat. Kekhawatiran banyak pihak bahwa aksi 411 dan 212 adalah indikasi maraknya Islamisme kurang mendasar karena aksi itu telah diboncengi berbagai kepentingan tidak hanya politik namun juga sentimen ekonomi, agama, dan etnis. Kontestasi dan dialektika narasi di ruang publik akan terus bergulir dan dalam konteks inilah parameter Islam ke-Indonesiaan akan terus berperan. Dalam kondisi inilah akan terbentuk apa yang disebut oleh Vedi Hadiz sebagai populisme Islam (*Islamic populism*), yaitu aliansi berbagai

-
- ²⁹ Ariel Heryanto, "Upgraded Piety and Pleasure: The New Middle Class and Islam in Indonesian Popular Culture", in *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*, London: Routledge, 2011, hlm. 60.
- ³⁰ Dale Eickelman, "Islam and the Language of Modernity" in *Daedalus*, Vol. 129, No. 1, Multiple Modernities (MIT Press, Winter, 2000), hlm. 131.
- ³¹ Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan...*, hlm. 48.
- ³² Greg Fealy, "Mengonsumsi Islam...", hlm. 28.

kelas dalam gerakan Islam.³³ Penulis meyakini bahwa kelas menengah Muslim perkotaan sebagai kekuatan dominan akan punya pengaruh besar dalam gerakan Islam antar-kelas ini.

Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa salah satu karakter paling signifikan bagi masyarakat modern dimana arus informasi begitu deras dan beragam adalah diferensiasi (perbedaan-perbedaan).³⁴ Dalam konteks Timur tengah, Vali Nasr menegaskan bahwa pertumbuhan kelas menengah Muslim akan mengalahkan pertumbuhan ekstremisme.³⁵ Senada dengan di Timur Tengah, pertumbuhan kelas menengah Muslim di Indonesia akan semakin mendorong menyebarnya nilai-nilai modern seperti perdamaian, keamanan, demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, toleransi beragama sehingga Islamisme, ekstremisme, dan radikalisme Islam akan tertinggal jauh dalam kontestasi di ruang publik.

Walaupun demikian, penulis tidak menafikan adanya tren Islam Indonesia yang sedang mengarah pada konservatisme. Tidak diragukan lagi bahwa Islam dan Muslim Indonesia banyak dipengaruhi oleh mengglobalnya dakwah salafisme. Senada dengan Andrée Feillard & Rémy Madinier, penulis meyakini bahwa merebaknya konservatisme Islam Indonesia akhir-akhir ini merupakan keragaman (*diversity*) beragama dan tidak akan membahayakan kebinekaan Indonesia.³⁶ Gugus kelas menengah Muslim adalah kelompok terdidik rasionalis yang menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Oleh karena itu, berbagai bentuk ancaman terhadap NKRI seperti ultra-konservatisme, ekstremisme dan radikalisme akan menjadi musuh bersama. Dimungkinkan bahwa masa depan Islam Indonesia bisa mengalami perubahan yang menurut penulis akan tetap pada koridor Islam Indonesia yang ramah dan toleran.

Akhirnya, penulis meyakini bahwa post-Islamisme akan menjadi masa depan Islam Indonesia. Sejalan dengan pengalaman beberapa negara di Timur Tengah yang menjadi acuan kajian Asef Bayat sehingga memunculkan konsep post-Islamisme,³⁷ idealisme Muslim Indonesia juga tetap berislam secara baik dan menggunakan mekanisme demokrasi untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dengan paradigma yang sama, Ariel Heryanto menegaskan bahwa post-Islamisme dalam konteks Indonesia bukan politik tapi kultural. Ia melihat bahwa Islam Indonesia lebih mengarah pada ketaqwaan religius yang populer, yaitu mengedepankan substansi (nilai-nilai)

³³ Lihat <http://www.sorgemagz.com/pemaparan-vedi-r-hadiz-di-bedah-buku-islamic-populism-in-indonesiaand-the-middle-east-l-depok-jawa-barat-24-agustus-2016/#.WI82XrFh2T8>

³⁴ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, 109.

³⁵ Vali Nasr, *The Rise of Islamic Capitalism: Why the New Muslim Middle Class is the Key to Defeating Extremism*. New York: Free Press, 2009, hlm. 254-255.

³⁶ Lihat Feillard, Andrée & Rémy Madinier, *The end of innocence?: Indonesian Islam and the Temptation of Radicalism*. Singapore: NUS, 2011, hlm. 269.

³⁷ Lihat Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford: Stanford University Press, 2007.

Islam ada di ruang-ruang publik daripada Islam sebagai formalitas di ranah politik. Bahkan, post-Islamisme yang berkembang di Indonesia bukan karena kegagalan Islam politik, tapi karena sikap represif Orde Baru yang memunculkan ketaqwaan di ranah kultural.³⁸

Kesimpulan

Globalisasi dan modernisasi telah banyak merubah wajah Islam Indonesia dengan meluasnya diferensiasi dan orientasi keagamaan. Arus informasi melalui teknologi dan media baru merupakan alternatif-alternatif nilai bahkan ideologi bagi manusia modern. Pada saat yang sama seorang manusia modern dengan mobilitas yang tinggi mulai kabur identitas kebudayaan asalnya (deteritorialisasi).³⁹ Sistem referensi individu dalam beragama juga sudah mengalami perubahan yang signifikan yang sulit dikontrol secara kolektif. Aksi damai 411 dan 212 bisa saja dianggap sebagai deteritorialisasi agama (Islam). Islam Indonesia sedang mengarah pada corak Islam global atau Islam salafi ala Timur Tengah?

Di sisi lain, agama pada dasarnya sangat adaptif dan responsif terhadap suatu konteks sosial budaya.⁴⁰ Kedatangan Islam (dari Saudi Arabia) ke wilayah Nusantara telah melahirkan karakteristik baru agama Islam. Oleh karena itu, walaupun pengaruh Islam global (Salafisme) sangat deras ke Indonesia, penulis meyakini bahwa karakteristik utama Islam Indonesia yang ramah dan toleran tetap akan menjadi karakter utama walaupun tentu mengalami dinamika penyesuaian. Nilai-nilai Islam yang telah mengakar kuat (*indigenization*) pada masyarakat Indonesia tetap akan dominan di tengah diferensiasi dan deteritorialisasi keagamaan seseorang. Islamisme atau ultra-konservatisme tidak akan menguat karena memang tidak mempunyai akar kuat di Indonesia.

Gugus masyarakat Muslim moderat perkotaan sebagai unsur dominan dalam aksi damai 411 dan 212 di satu sisi merupakan massa yang “rentan” terhadap arus informasi (nilai dan ideologis) dari berbagai arah. Namun demikian, sebagai kelompok Muslim moderat perkotaan yang mayoritas berpendidikan relatif tinggi tidak akan mudah merubah ideologinya, apalagi yang bertentangan secara diametral terhadap nilai-nilai ideologi kebangsaan mereka. Fakta menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara tidak mendapatkan resistensi yang signifikan sejak era reformasi. Di sisi lain wacana daulah (negara) dan khilafah Islam juga hanya berkembang seputar segelintir kelompok tertentu saja. Sebagaimana telah dijelaskan, masa depan Islam Indonesia bisa jadi memang akan lebih konservatif seiring dengan maraknya

³⁸ Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan...*, hlm. 60-65.

³⁹ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi* ..., hlm. 117.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

gerakan dakwah Islam global (salafisme). Tapi penulis tetap meyakini bahwa gugus Muslim moderat perkotaan akan merupakan fondasi kokoh masa depan Islam Indonesia yang mengarah ke post-Islamisme.

Di tengah memudarnya ikatan-ikatan tradisional karena globalisasi dan modernisasi, kerja-kerja besar untuk menguatkan kembali nilai-nilai budaya lokal masih terus diperlukan. Dalam konteks inilah organisasi-organisasi besar moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai organisasi *civil society* (CSO) harus bekerja keras mengimbangi dakwah kelompok Islamisme dan ultra-konservatisme khususnya di ranah publik. Lebih dari itu, Muhammadiyah, NU, dan berbagai organisasi Islam moderat lainnya akan tetap menjadi penjaga gawang terhadap Pancasila dan NKRI. Hal ini selaras dengan pengamat Muhammadiyah kawakan, Mitsuo Nakamura, yang mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu contoh kelas menengah Muslim bisa menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*) ketika negara sedang mengalami krisis. Nakamura menambahkan bahwa Muhammadiyah akan berperan sebagai kekuatan yang luar biasa untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan sosial di Indonesia.⁴¹ Politisasi isu penistaan agama sebagaimana yang terjadi saat ini hanyalah riak-riak kecil demokratisasi yang tidak berpotensi memecah belah atau mengganggu kebinekaan Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Eickelman, Dale. "Islam and the Language of Modernity" in *Daedalus*, Vol. 129, No. 1, Multiple Modernities (MIT Press, Winter, 2000).
- Fealy, Greg & Sally White. *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Feillard, Andr e & R emy Madinier, *The end of innocence?: Indonesian Islam and the Temptation of Radicalism*. Singapore: NUS, 2011.
- Hefner, Robert W. *Islam in Indonesia's Political Future*. Virginia: CAN Project Asia, 2002
- Heryanto, Ariel (ed). *Budaya Populer di Indoensia: Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Jalasutra, 2012.

⁴¹ Lihat <http://www.umm.ac.id/id/berita/prof-nakamura-muhammadiyah-social-safety-net.html> Januari 2017].

[diakses pada 27

- Heryanto, Ariel. “*Upgraded Piety and Pleasure: The New Middle Class and Islam in Indonesian Popular Culture*”, in A. N. Weintraub (ed.), *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*, London: Routledge, 2011.
- Heryanto, Ariel. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Ibrahim, Idi Subandy & Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Obor, 2014.
- Mahmood, Saba, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. New Jersey: Princeton University Press, 2005
- Nasr, Vali. *The rise of Islamic capitalism: why the new Muslim Middle Class is the key to defeating Extremism*. New York: Free Press, 2009.
- Sindhunata. *Sakitnya melahirkan demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/2343444/muhammadiyah-apresiasiaksi-212>
- <https://www.tempo.co/read/fokus/2016/11/22/3390/rencana-demo-2desember-warga-nu-dan-muhammadiyah-diminta-tak-ikut> [diakses tanggal 26 Januari 2017].
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/869375-reaksi-habib-rizieqdikukuhkan-jadi-imam-besar-umat-islam> dan <http://www.tarbawia.com/2017/01/video-kiyai-sepuh-nu-baiat-habib-rizieq.html> [diakses tanggal 26 Januari 2017]. <http://pks.id/content/pernyataan-sikap-pks-terhadap-aksi-bela-islam-iii> [diakses tanggal 26 Januari 2017]. <http://www.dobrak.net/2016/12/romantisme-aksi-212-kebanggaan-dan.html> [diakses tanggal 26 Januari 2017].
- <http://www.sorgemagz.com/pemaparan-vedi-r-hadiz-di-bedah-buku-islamicpopulism-in-indonesia-and-the-middle-east-l-depok-jawa-barat-24agustus-2016/#.WI82XrFh2T8> [diakses 31 Januari 2017].
- <http://www.umm.ac.id/id/berita/prof-nakamura-muhammadiyah-socialsafety-net.html> [diakses pada 27 Januari 2017].

